

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari variabel jumlah mahasiswa, investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap nilai PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di pengaruhi oleh variabel ekonomi makro seperti Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan bukan oleh variabel Jumlah Mahasiswa.

1. Dari hasil analisis diperoleh jumlah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan adanya hubungan positif antara jumlah mahasiswa dan PDRB Dikarenakan oleh tempat tinggal atau penginapan mahasiswa yang kuliah di Provinsi D.I Yogyakarta masih termasuk ke dalam sektor informal sehingga tidak dihitung dalam pendapatan nasional, sehingga jumlah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap PDRB.
2. Dari hasil analisis diperoleh Investasi berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti Ketika nilai Investasi mengalami kenaikan 0,0083 persen maka PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar Rp. 873.654.
3. Dari hasil analisis diperoleh Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti Ketika

koefisien sebesar 18.05154 yang artinya setiap kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 1 juta orang maka akan meningkatkan nilai PDRB sebesar Rp 18.051.540.

4. Dari hasil analisis diperoleh Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan koefisien sebesar 0.002742 yang artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan nilai PDRB sebesar Rp. 2.742.

5.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisa data, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan membuat regulasi tentang pengenaan pajak terhadap penginapan mahasiswa seperti kos-kosan. Karena selama ini kos-kosan masih termasuk sektor informal sehingga belum terkena pajak.
2. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah hendaknya mengambil kebijakan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif seperti pengurusan perizinan dan pajak, realisasi pembangunan infrastruktur dengan cepat serta kepastian peraturan ketenaga kerjaan.